

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

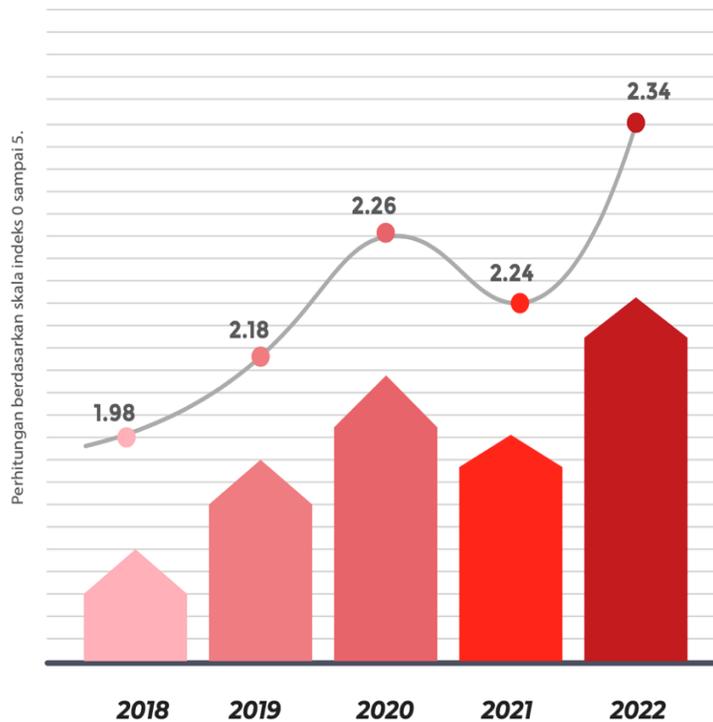
Perkembangan zaman yang semakin maju, banyak organisasi ataupun SDM dituntut untuk dapat berinovasi. Lebih spesifik, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang saat ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari membuat manusia sangat mudah untuk mencari, mempelajari bahkan mendapatkan informasi. Bukan hanya itu, TIK menjadi salah satu langkah strategis dalam mengimplementasikan berbagai kegiatan untuk menyelenggarakan pelayanan baik itu penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik sehingga efektifitas dan efisiensi urusan pemerintahan dapat meningkat (Kuru et al., 2021).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE merupakan terobosan dalam mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. SPBE diatur pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang memuat ketentuan tata kelola penggunaan TIK untuk memberikan pelayanan prima kepada pengguna dalam hal ini masyarakat maupun antar Organisasi Pemerintah itu sendiri. Salah satu hal yang berkaitan dengan SPBE adalah penyusunan arsitektur SPBE, arsitektur SPBE merupakan sebuah kerangka inti yang menterjemahkan mulai dari proses bisnis, data & informasi, infrastruktur, aplikasi, sampai dengan keamanan dalam mewujudkan suatu layanan yang terintegrasi (Syahrani Qotrunnisa, 2021).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi yang merujuk tentang Pedoman Evaluasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik menyebutkan bahwasannya untuk mewujudkan pelaksanaan SPBE di setiap instansi pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan tujuannya perlu dilakukan evaluasi secara berkala (Hidayah & Almadani, 2022). Nanik Murwati selaku Deputi Bidang

Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian PANRB menekankan bahwa proses evaluasi SPBE bukan semata untuk berkompetisi dalam mendapatkan nilai tertinggi secara pemeringkatan nasional, namun bagaimana suatu instansi pusat dan daerah melalui proses evaluasi tersebut dapat diketahui sudah sejauh mana penerapan SPBE (MENPAN RB, 2023). Yang menjadi masalah adalah bagaimana jika suatu daerah belum memenuhi implementasi SPBE dengan segala integrasi yang cenderung kompleks, berujung kepada kebimbangan dalam menentukan langkah strategis pada upaya perbaikan.

Gambar 1. 1 Indeks SPBE Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: Kemenpan RB Tahun 2022

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi SPBE telah dilakukan sejak tahun 2018. Seperti yang diketahui; kegiatan evaluasi dilakukan terhadap Kementerian, Lembaga, Instansi Pusat lainnya, serta Pemerintah Daerah. Sejak tahun 2021, pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE menggunakan

instrumen yang tercantum pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Instrument ini makin disesuaikan dari pelaksanaan Evaluasi SPBE pada tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan 37 indikator menjadi 47 indikator. Hingga Desember 2022, masih terdapat 18 Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan evaluasi SPBE. Secara Nasional, indeks Tingkat Kematangan SPBE tahun 2022 adalah sebesar 2,34 atau setara dengan predikat “Cukup” (MENPAN RB, 2023).

Berdasarkan trend menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No.108/2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 bahwasannya telah dilakukan pemantauan instansi sebanyak 451 IPPD serta 103 IPPD dievaluasi. Lebih spesifik, ke-7 IPPD yang meraih predikat “Sangat Baik” pada Monev SPBE tahun 2022 seperti Provinsi DKI Jakarta; Kabupaten Sumedang; Kota Bandung; Kota Surakarta; Kota Surabaya; Kabupaten Polewali Mandar; dan Kota Denpasar. Menurut PermenPANRB No. 59/2020 yang dipaparkan oleh Humas MenpanRB, menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi trend Indeks SPBE dengan predikat “Sangat Baik” adalah:

- 1.) Koordinasi antara pusat dan daerah,
- 2.) Penilaian mandiri,
- 3.) Penilaian Dokumen,
- 4.) Wawancara dengan Instansi (Klarifikasi hasil isian penilaian dokumen IPPD),
- 5.) Penilaian visitasi klarifikasi dan validasi kondisi eksisting/lapangan terhadap jawaban, penjelasan serta bukti pendukung (MENPAN RB, 2023).

Penelitian ini mengangkat permasalahan yang terjadi pada lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan khususnya Dinas Komunikasi Dan Informatika, yaitu dari segi penerapan SPBE. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menyadari betapa pentingnya peran SPBE dengan segala kompleksitasnya untuk mendukung semua sektor pembangunan kendati dirasa belum mencapai tingkat kemajuan sebagaimana

yang diharapkan (Perubah et al., 2022). Sehubungan dengan hal tersebut, penulis melakukan studi terhadap Pemerintah Kabupaten Buton Selatan untuk menganalisis sejauh mana penerapan Arsitektur SPBE Domain Proses Bisnis pada pemerintah terkait. dengan teknologi dan informasi yang secanggih saat ini, bukan tidak mungkin untuk mewujudkan standarisasi dan juga integrasi proses bisnis. Setelah diselidiki sedikit, penulis menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Buton selatan telah mengupayakan pendorongan penerapan SPBE melalui sistem informasi berbasis website.

Penulis melihat fenomena ini menjadi menarik bilamana SPBE yang berbicara perihal integrasi antar organisasi pusat maupun daerah, namun diterapkan pada segelintir Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja, yang mengindikasikan terdapat suatu ketidakkonsistenan semua OPD dalam mengelola sistem informasi berbasis website. Hal itulah yang terjadi pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, sebab seperti yang diketahui bahwasannya sistem informasi berbasis website membutuhkan perencanaan yang matang, mulai dari adanya fasilitas yang memadai, organisasi yang mengelola serta sumber daya manusia yang tentunya berkompeten. Selain itu, diperlukan tujuan yang jelas dalam pembuatan sistem informasi berbasis website, hal ini agar Pemerintah setempat tahu pelayanan apa saja yang harus ada dalam suatu website agar tujuan dapat tercapai.

Berkaitan dengan manajemen SPBE pada lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan diatas, maka diperlukan sebuah penelitian tentang “Model Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Domain Proses Bisnis (Studi Pada: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan)” yang dirumuskan pada beberapa fokus penelitian dalam hal berikut:

1. **Preliminary phase:** Fase persiapan untuk penggalan akan kebutuhan organisasi serta prinsip arsitektur SPBE yang sesuai dengan Diskominfo Kab. Buton Selatan.

2. **Architecture Vision:** Fase awal dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan berdasarkan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sehingga dapat dilakukan penggambaran pengembangan arsitektur yang cocok.
3. **Arsitektur Proses Bisnis:** Fase utama dalam pemodelan Arsitektur SPBE yang memiliki output peta proses bisnis, peta relasi serta katalog domain proses bisnis.

Berdasarkan Hasil evaluasi SPBE pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menerapkan SPBE dengan nilai indeks SPBE sebesar 1,32 dengan predikat ‘kurang’. Adapun hasil evaluasi SPBE yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	2,59	Cukup
2	Pemerintah Kab. Konawe	1,84	Cukup
3	Pemerintah Kab. Buton	2,02	Cukup
4	Pemerintah Kab. Muna	2,24	Cukup
5	Pemerintah Kab. Kolaka	3,48	Baik
6	Pemerintah Kab. Konawe Selatan	2,67	Baik
7	Pemerintah Kab. Kolaka Utara	2,04	Cukup
8	Pemerintah Kab. Bombana	2,13	Cukup
9	Pemerintah Kab. Wakatobi	1,50	Kurang
10	Pemerintah Kab. Buton Utara	2,05	Cukup
11	Pemerintah Kab. Konawe Utara	2,10	Cukup
12	Pemerintah Kab. Kolaka Timur	2,33	Cukup
13	Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan	1,96	Cukup

14	Pemerintah Kab. Buton Selatan	1,32	Kurang
15	Pemerintah Kab. Buton Tengah	2,61	Baik
16	Pemerintah Kab. Muna Barat	1,81	Cukup
17	Pemerintah Kota Kendari	2,42	Cukup
18	Pemerintah Kota Baubau	1,95	Cukup

Sumber: Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.1, terdapat 18 Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga dilakukan evaluasi kematangan SPBE, dengan hasil diantaranya 3 (tiga) Kabupaten berpredikat baik, dan sebanyak 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota berpredikat cukup, serta Kabupaten Buton Selatan menjadi satu-satunya berpredikat kurang.

Dengan capaian indeks SPBE 1,32 dengan predikat kurang tersebut, tentunya terdapat beberapa aspek yang masih lemah/kurang, sehingga perlu dilakukan analisis terkait faktor apa yang membuat indeks SPBE Kabupaten Buton Selatan masih dibawah standar, berbekal penelitian ini tentu Pemkab Busel dapat mempertimbangkan pelaksanaan kebijakan yang dilanjutkan dengan evaluasi agar mengetahui tingkat capaian dan hal apa saja yang perlu diperbaiki.

Bersumber pada latar belakang diatas, perancangan penelitian ini berdasarkan Arsitektur SPBE yang disesuaikan dengan metode TOGAF ADM untuk menggambarkan model arsitektur yang berfokus pada domain proses bisnis di lingkup Pemkab Buton Selatan. Keluaran perancangan model arsitektur proses bisnis SPBE ini yakni berupa peta proses bisnis level 0, peta relasi, serta katalog proses bisnis yang diidentifikasi berdasarkan RKPD Kabupaten Selatan Tahun 2024.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran kondisi eksisting kelengkapan domain proses bisnis pada arsitektur SPBE Kabupaten Buton Selatan dan apa faktor yang membuat nilai indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Buton Selatan masih dibawah standar?
2. Bagaimana model arsitektur SPBE pada domain proses bisnis yang cocok untuk lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kondisi eksisting kelengkapan domain proses bisnis arsitektur SPBE Kabupaten Buton Selatan serta mendeskripsikan faktor apa saja yang membuat nilai indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Buton Selatan masih dibawah standar.
2. Menggambarkan model arsitektur SPBE domain proses bisnis yang cocok untuk lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan pengetahuan perihal arsitektur SPBE khususnya pada domain proses bisnis. Melalui analisis mendalam terhadap model arsitektur SPBE beserta domain yang mengacu pada pedoman arsitektur SPBE Nasional, penelitian ini memperkaya pemahaman teoritis tentang bagaimana teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) dapat dioptimalkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses bisnis pada Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Selain itu juga, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada pengembangan keilmuan seputar arsitektur SPBE di tingkat nasional, instansi pusat, maupun pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat khususnya sebagai bahan masukan dan pertimbangan terhadap penerapan pada SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Sebagai upaya untuk memahami model arsitektur yang sesuai dengan kondisi eksisting, kebutuhan serta karakteristik proses bisnis di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dapat meningkatkan kinerja operasional mereka. Implementasi yang tepat dari model penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan pelayanan publik, efisiensi administrasi, juga transparansi dalam pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Buton Selatan.

1.5 Kajian Teori

1.5.1 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 pada Pasal 1 Ayat 1 yang mengatakan “Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada user SPBE”. Maksud dari user SPBE yakni orang yang menggunakan layanan SPBE baik itu masyarakat, aparat pemerintah, maupun businessman (Kementerian Sekretariat Negara, 2018). SPBE bertujuan untuk membantu terwujudnya birokrasi pemerintahan yang selaras serta berperforma tinggi, agar pelayanan publik semakin meningkat dan berkualitas, tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, efisien, dan efektif dapat terwujud, yang nantinya akan dapat melahirkan bangsa Indonesia yang mampu berdaya saing. Selain itu, berdasarkan (Kementerian Sekretariat Negara, 2018)

juga, terdapat arah kebijakan strategi dan peta rencana strategis SPBE yang dijabarkan ke dalam 4 (empat) area, yaitu:

1. **Tata Kelola SPBE:** sebuah usaha pembaruan tata kelola SPBE dengan cara menyempurnakan kemampuan dalam mengelola sistem terstruktur pada penerapan serta kebijakan SPBE guna menciptakan SPBE yang sistematis dan lengkap.
2. **Layanan SPBE:** sebuah upaya meningkatkan kualitas layanan SPBE dengan mengembangkan user centered.
3. **Teknologi Informasi dan Komunikasi:** sebuah usaha penggabungan TIK dengan melakukan integrasi data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur SPBE.
4. **Sumber daya manusia SPBE:** sebuah usaha pembangunan pemangku SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bagi SPBE.

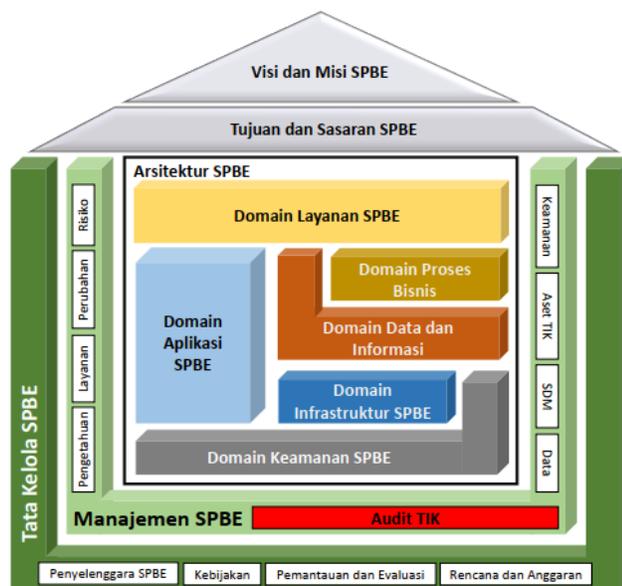
1.5.2 Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data & informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi. Arsitektur SPBE dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah (Kementerian Sekretariat Negara, 2018).

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Arsitektur SPBE Nasional bertujuan sebagai panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data & informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu secara nasional. Arsitektur SPBE Nasional terdiri dari unsur domain arsitektur dan referensi arsitektur. Domain arsitektur adalah substansi arsitektur

yang memuat domain arsitektur proses bisnis, data & informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE. Sedangkan referensi arsitektur adalah komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan setiap domain arsitektur yang terdiri dari referensi arsitektur proses bisnis (RAB), referensi arsitektur data & informasi (RAD), referensi arsitektur layanan (RAL), referensi arsitektur aplikasi (RAA), referensi arsitektur infrastruktur (RAI) dan referensi arsitektur keamanan (RAK) (Kementerian Sekretariat Negara, 2018).

Gambar 1. 2 Komponen Arsitektur SPBE



Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
Tahun 2021

Gambar 1.2 merupakan rumah dari domain arsitektur serta referensi arsitektur dalam penyusunan arsitektur SPBE, Setiap domain arsitektur memiliki struktur berupa tingkatan yang terbentuk dari berbagai komponen dasar referensi arsitektur. Tingkatan tersebut berfungsi untuk memastikan

relasi antar domain dan antara arsitektur SPBE Nasional, Pusat, Daerah dapat selaras dengan baik.

Oleh karena itu, untuk memudahkan pengelolaan Arsitektur SPBE di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, diperlukan pembangunan sistem Arsitektur SPBE yang mengelola informasi terkait Arsitektur SPBE Buton Selatan dengan memperhatikan Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.5.3 Arsitektur Proses Bisnis

Proses Bisnis adalah serangkaian kegiatan terstruktur dan saling berkaitan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat serta pemerintah daerah. Penyusunan Proses Bisnis bertujuan sebagai panduan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi, sehingga menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka. Selain itu, Proses Bisnis memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

Pada fase ini, arsitektur proses bisnis menjadi tahapan utama dalam perancangan Enterprise Architecture. Pada dasarnya, tujuan pembuatan peta proses bisnis SPBE bagi pemerintah daerah yakni agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, karena 2 (dua) kata kunci itulah yang menunjukkan keluaran layanan SPBE kepada masyarakat maupun antar instansi (Gerry Firmansyah & Zulikha Niniekasari, 2023).

Dalam penyelenggaraan SPBE Daerah, setiap Perangkat Daerah menyusun dan merekayasa ulang proses bisnis di bawah supervisi oleh Kepala Bagian Organisasi. Penyusunan dan rekayasa ulang proses bisnis dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE Daerah dan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Tujuan rekayasa ulang ini adalah untuk meningkatkan efisiensi Proses Bisnis. Hasil rekayasa ulang tersebut kemudian ditetapkan oleh pimpinan masing-masing Perangkat Daerah.

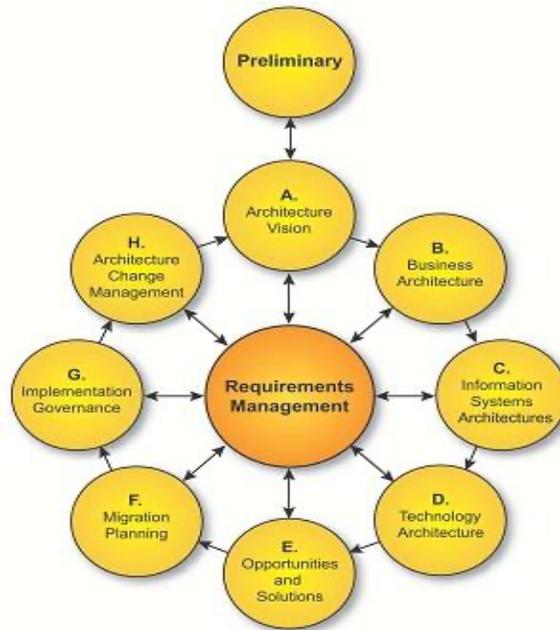
1.5.4 *Enterprise Architecture*

Enterprise Architecture (EA) merupakan cetak biru konseptual yang mendefinisikan struktur dan operasi organisasi. Maksud dari EA ialah untuk menentukan bagaimana suatu organisasi dapat secara efektif mencapai tujuannya pada masa kini dan masa depan. EA melibatkan praktik menganalisis, merencanakan, merancang, dan pada akhirnya mengimplementasikan analisis kepada suatu perusahaan maupun instansi. Selanjutnya, EA juga menjadi sebuah blueprint yang menjelaskan bagaimana bagian TIK serta manajemen informasi dapat bekerja sama sebagai satu kesatuan yang utuh. Kerangka kerja tersebut menggambarkan infrastruktur yang dibutuhkan oleh instansi untuk mencapai tujuan dan visi dalam membentuk tata kelola TIK secara tepat (Perez-Castillo, Ricardo Francisco Ruiz Mario Piattini, 2019).

1.5.5 *The Open Group Architecture Framework (TOGAF)*

The Open Group Architecture Framework atau yang biasa dikenal dengan TOGAF merupakan sebuah kerangka kerja yang dipopulerkan oleh Open Group sejak tahun 1995. Kerangka kerja ini banyak digunakan oleh arsitektur organisasi dalam mengembangkan EA dengan cara merancang, merencanakan, melaksanakan, dan mengatur suatu arsitektur organisasi. Adapun pengertian TOGAF secara spesifik yaitu suatu kerangka rancangan EA yang telah memiliki tahapan terstruktur dalam bentuk fase yang ada dalam Architecture Development Method (ADM). Metode ini menjadi hasil dari kontribusi para arsitek dalam mengembangkan berbagai arsitektur organisasi (Framework, 2022).

Gambar 1. 3 TOGAF ADM



Sumber: *The Open Group*, Tahun 2022

Gambar 1.3 menunjukkan fase dari TOGAF ADM, yang bermula dari tahap Preliminary dan diakhiri dengan tahap Architecture Change Management. Adapun penjelasannya seperti berikut:

1. **Preliminary Phase:** Merupakan proses persiapan penyusunan kapabilitas arsitektur dan pendefinisian prinsip-prinsip arsitektur. Tahapan ini penting dilakukan karena berdampak pada kesuksesan proses penyusunan arsitektur
2. **Phase A, Architecture Vision:** Merupakan proses inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur berupa pendefinisian ruang lingkup, identifikasi Stakeholders, penyusunan visi arsitektur, serta pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur.
3. **Phase B, Business Architecture:** Merupakan proses pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati.

4. **Phase C, Information System Architecture:** Merupakan proses pengembangan arsitektur informasi yang meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang bakal digunakan oleh instansi.
5. **Phase D, Technology Architecture:** Merupakan tahap penyusunan arsitektur teknologi, dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi seperti software dan hardware
6. **Phase E, Opportunities and Solutions:** Merupakan proses identifikasi perbandingan antara baseline Architecture dengan target Architecture dari setiap tahap sebelumnya sekaligus menjadi klarifikasi pengembangan baru atau penggunaan kembali sistem yang telah ada.
7. **Phase F, Migration and Planning:** Merupakan proses analisis resiko dan biaya berupa penafsiran ketergantungan, biaya, manfaat dari proyek migrasi yang bervariasi yang diurutkan berdasarkan prioritas.
8. **Phase G, Implementation Governance:** Merupakan proses pengawasan terhadap implementasi arsitektur.
9. **Phase H, Architecture Change Management:** Merupakan proses penyusunan dari prosedur-prosedur untuk mengelola perubahan ke arsitektur yang baru, yang kemudian diuraikan menjadi penggerak perubahan serta bagaimana mengelola perubahan tersebut, dari pemeliharaan hingga perancangan arsitektur kembali.
10. **Requirements Management:** Merupakan proses pengujian pada pengelolaan persyaratan dan kebutuhan arsitektur selama fase TOGAF ADM berlangsung.

1.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam meningkatkan pengetahuan terkait penelitian ini, maka perlu disertakan penelitian sebelumnya dengan topik yang berkorelasi dengan

penelitian yang akan dilakukan. Berikut disajikan rangkuman penelitian-penelitian yang berkaitan dalam kurun waktu dua sampai tiga tahun.

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu.

No	Judul dan Tahun	Penulis	Hasil
1.	Model Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Domain Proses Bisnis Pada Pemerintah Kabupaten Kuningan (Tahun 2021)	Gede Sudanta Nethan Kuru, Soni Fajar Surya Gumilang, Ryan Adhitya Nugraha	Penelitian ini menyinggung terhadap pentingnya aspek integrasi dan dokumentasi secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Penelitian ini menghasilkan peta proses bisnis level 0 yang memiliki 15 proses (sasaran strategis) yang bertujuan untuk menjelaskan keseluruhan proses yang akan dijalankan untuk mencapai visi misi Kabupaten Kuningan.
2.	Arsitektur Enterprise Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Domain Layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (Tahun 2023)	Ari Fajar Santoso, Falahah, dan Firyal Muthia Nadhifah	Penelitian ini mengungkapkan bahwa pada perancangannya; yang diawali dengan Preliminary Phase, Architecture Vision dan arsitektur layanan menghasilkan model arsitektur EA berupa katalog serta matriks. Adapun layanan yang telah disesuaikan dengan proses bisnis level 0 yang dimana telah disesuaikan pula dengan aplikasi umum juga aplikasi khusus.
3.	Model Arsitektur Layanan Administrasi Pemerintahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah Kuningan (Tahun 2021).	Alifiani S Qotrunnisa, Soni F S Gumilang, Ryan A Nugraha	Penelitian ini berfokus pada Arsitektur Layanan yang menjadi satu keluaran berupa katalog layanan administrasi pemerintahan serta proses bisnis pada Pemkab. Kuningan. Katalog layanan tersebut dapat menjelaskan mengenai penyedia layanan maupun pengguna layanan.

4.	Perancangan Arsitektur Enterprise Untuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Domain Aplikasi Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Tahun 2021)	Khadijah Halimah Assa'diyah, Soni Fajar Gumilang, Rahma Mulyana	Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya untuk dapat mendukung proses bisnis level 0 dan layanan berdasarkan program prioritas, dibutuhkan analisis berdasarkan kondisi eksisting khususnya pada katalog aplikasi yang berisikan pemetaan aplikasi berdasarkan aplikasi umum, aplikasi khusus, serta matrix aplikasi.
5.	Perancangan Arsitektur Enterprise Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamongan (Tahun 2023).	Lim'atin Amaliya	Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya kerangka kerja yang terus berkembang pada lingkup Enterprise Architecture, dapat dilakukan penelitian lebih lanjut lagi khususnya pada 3 layanan lain di lingkup Pemerintah Kab Lamongan; layanan PPID, CIRT dan Satu Data Lamongan.

Sumber: Olah data Peneliti Tahun 2024

Tabel 1.2 menjadi acuan penulis dalam merancang penelitian ini. Acuan yang dimaksud meliputi penyusunan peta proses bisnis yang bertujuan agar Pemkab. Buton Selatan mampu melaksanakan urusannya sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang tertera pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Bukan hanya itu, penulis juga mengadaptasi metode penelitian yang digunakan oleh (Syahrini Qotrunnisa, 2021) yakni studi literatur dan juga melakukan Focus Group Discussion dalam hal ini terhadap stakeholders Kab. Buton Selatan khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya pada perancangan Enterprise Architecture SPBE yang menggunakan TOGAF ADM, model arsitektur dibuat serta disesuaikan berdasarkan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

Lebih lanjut, penulis juga melakukan metode penelitian yang selaras dengan yang telah dilakukan oleh (Halimah Assa'diyah et al., 2021), dimana untuk melakukan fokus penelitian pada Preliminary Phase yang disebutkan sebelumnya; merujuk pada fase inisiasi atau permulaan akan kebutuhan organisasi dalam hal ini Pemkab. Buton Selatan. Fase TOGAF lain yang menjadi fokus penelitian lainnya ini mencakup Architecture Vision, menjadi fase awal penulis dalam mengetahui sekaligus mengidentifikasi Stakeholders yang selanjutnya dapat digambarkan menjadi Value Chain Diagram yang memiliki tujuan sebagai analisis urusan internal Pemkab Buton Selatan.

1.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan unsur penelitian yang menjelaskan mengenai karakteristik yang hendak diteliti. Berdasarkan kajian teori beserta tinjauan penelitian terdahulu, penulis mengutarakan definisi konseptual yakni sebagai berikut:

- a. Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar dalam melaksanakan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi hingga kemandirian untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
- b. Arsitektur SPBE pada domain proses bisnis menjadi tahapan utama dalam perancangan Enterprise Architecture itu sendiri.
- c. Enterprise Architecture merupakan kumpulan metode dan prinsip yang dapat mewujudkan keselarasan bisnis dengan teknologi informasi suatu organisasi.
- d. Model perancangan arsitektur proses bisnis mengacu pada Amanah Perpres No 95. Tahun 2018 beserta PermenPANRB No. 19 Tahun 2018.
- e. Tujuan penyusunan peta proses bisnis yaitu agar setiap instansi pemerintah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien; dalam hal ini mudah mengkomunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan dapat tercapai visi, misi dan tujuannya.

1.8 Definisi Operasional

Tabel 1. 3 Fase awal TOGAF ADM / Indikator Pengembangan EA Pada Arsitektur

No	Aspek	Penjelasan/Indikator
1.	Preliminary phase	Merupakan fase inisiasi kebutuhan organisasi serta prinsip-prinsip arsitektur sesuai dengan arahan instansi/organisasi.
2.	Architecture Vision	Merupakan fase awal untuk menggambarkan ruang lingkup pengembangan arsitektur, mengidentifikasi stakeholders beserta nilai-nilai utama dalam mencapai visi misi instansi/organisasi.
3.	Arsitektur Proses Bisnis	Merupakan fase utama dalam pemodelan strategi bisnis organisasi, dalam konteks SPBE ini dapat dilakukan

		pendefinisian dan penyusunan peta proses bisnis.
--	--	--

Sumber: Dikelola Oleh Penulis, Tahun 2023

Sebagai acuan penelitian ini, penulis menggunakan tahapan yang dikonsepsikan (Kuru et al., 2021) perihal aturan dan prosedur yang digunakan dalam proses berjalannya penelitian. Tahapan penting dalam penelitian ini adalah pengumpulan data terkait kondisi eksisting pelaksanaan SPBE pada lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

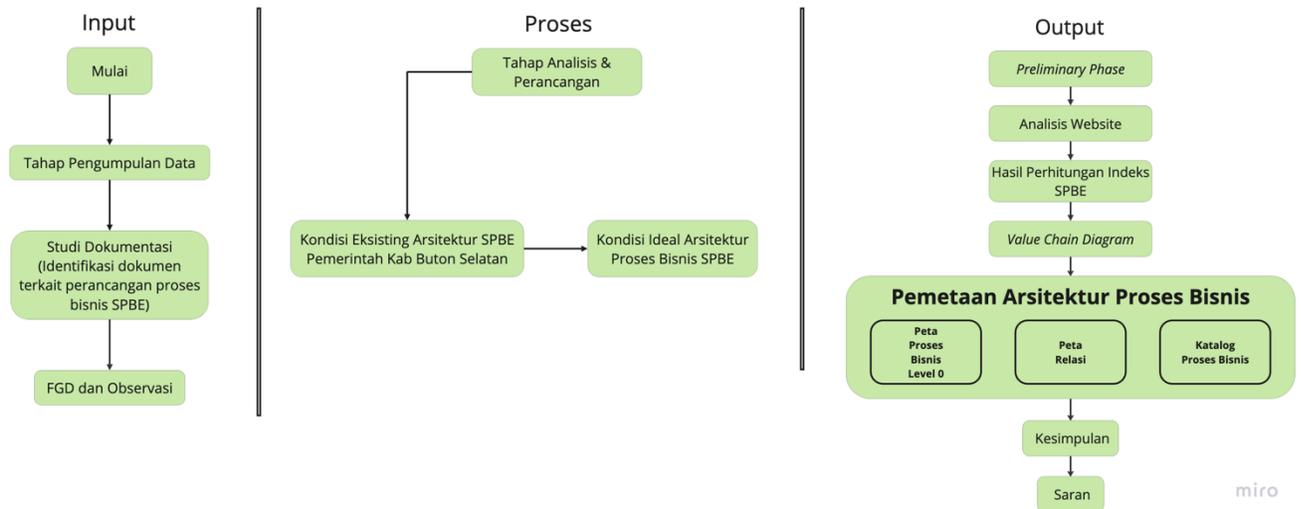
Dalam memenuhi jawaban dari rumusan masalah terkait gambaran kondisi eksisting kelengkapan domain Arsitektur SPBE beserta faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Buton Selatan masih dibawah standar Indeks SPBE Nasional, maka definisi operasional menggunakan tabel indikator pengembangan Enterprise Architecture yang juga menjadi fase awal dari TOGAF ADM guna mengidentifikasi Arsitektur SPBE pada lingkup Pemerintah Kabupaten Buton selatan. Identifikasi arsitektur SPBE mencakup implementasi teknologi Informasi di lingkungan Kabupaten Buton Selatan yang digerakkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang sekaligus sebagai penanggung jawab tata kelola TIK di Kabupaten Buton Selatan. Dengan demikian, Penulis dapat menafsirkan data serta analisis yang lebih fokus dan efisien terkait penelitian Model Arsitektur SPBE khususnya pada domain proses bisnis untuk lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tahapan dan Jenis Penelitian

Tahapan penelitian merupakan langkah atau rangkaian proses yang dilakukan penulis sebagai skema dalam melakukan perancangan model

arsitektur domain proses bisnis pada Dinas Komunikasi dan Informatika



Kabupaten Buton Selatan. Tahapan penelitian terdiri dari sebagai berikut.

Gambar 1. 4 Tahapan Penelitian

Sumber: Dikelola Oleh Penulis, Tahun 2023

Skema perancangan penelitian yang tertera pada gambar 1.4 menunjukkan bahwasannya penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimana merupakan prosedur menghasilkan data deskriptif berupa kata kata baik itu dari orang-orang yang menjadi narasumber pada penelitian maupun hasil dari studi dokumentasi yang penulis lakukan. Pada tahap awal penelitian ini adalah tahap pengumpulan data, yang dimulai dari studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengidentifikasi dokumen serta mempelajari dokumen yang berkaitan dengan SPBE dan proses bisnis, seperti Perpres No. 95 Tahun 2018, PermenPANRB No. 95 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penulis juga melakukan studi dokumentasi atau literatur terhadap RKPD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 dan data pendukung lainnya seperti dokumen arsitektur SPBE milik Pemerintah Kabupaten Bogor dan Cirebon.

Bukan hanya itu, peneliti juga mempelajari jurnal-jurnal ilmiah yang relevan khususnya penelitian yang membahas mengenai Enterprise Architecture beserta Model Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Selanjutnya penulis melakukan observasi dalam Focus Group Discussion (FGD), observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengamati bagaimana keadaan atau kondisi yang terjadi terhadap kendala dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan yang mengacu pada Point Of View (POV) birokrat Pemkab setempat.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini merujuk langsung pada objek atau Dinas yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Selatan. Adapun alasan penulis mengambil objek penelitian pada Dinas tersebut ialah berdasarkan Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor: 22 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Buton Selatan; disebutkan bahwasannya Diskominfo bertanggungjawab terhadap tatakelola teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) yang sejalur dengan E-Government dalam menciptakan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang efektif dan efisien.

1.9.3 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dan diolah dari tangan pertama, dalam hal ini adalah penulis. Lebih jelasnya, data primer merupakan sumber data mentah yang diberikan langsung kepada pengumpul data/peneliti (Syafnidawaty, 2020). Pada penelitian yang berkaitan dengan penyusunan

Model Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik seperti ini, sumber data primer yang didapatkan melalui pengamatan atau observasi dalam kegiatan FGD. Adapun pengertian Focus Group Discussion yang merupakan sebuah teknik diskusi yang digunakan untuk membahas topik tertentu secara mendalam. Topik yang dibahas pun dapat beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi maupun perusahaan (CakeResume, 2023). Dalam penelitian ini, FGD termasuk dalam penelitian kualitatif yang melibatkan metode observasi, analisis dan identifikasi. FGD ini menghadirkan subjek/narasumber yang adalah 1 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Selatan yang di arahkan langsung oleh Pelaksana Analisis Data dan Informasi Bidang Aplikasi dan Teknologi Informasi Komunikasi (APTIKA) Bapak Firman Saputra, S.SI., M.SI. FGD dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan Diskominfo Buton Selatan terhadap isu Arsitektur SPBE di lingkungan Pemkab setempat. Adapun berikut ini gambaran FGD yang dilaksanakan pada 16 November 2023 via aplikasi Zoom.

Gambar 1. 5 FGD Bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Buton Selatan

Sumber: Observasi Peneliti, Tahun 2023

Gambar 1.5 menunjukkan bahwa peneliti melakukan tahap pengumpulan data secara langsung terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Buton Selatan. Selanjutnya, peneliti sajikan daftar hadir pada



FGD yang telah dibuatkan pada tabel berikut:

Tabel 1. 4 Data Hadir FGD

No.	Nama	Instansi	Jabatan	Peran
1.	LA Amirudin, S.Pd, M.Si	Dinas Komunikasi dan Informatika Buton Selatan	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Buton Selatan.	Narasumber
2.	LM. Suharjono, S.Pd., M.Si	Dinas Komunikasi dan Informatika Buton Selatan	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Narasumber
3.	Firman Saputra, S.SI., M.SI	Dinas Komunikasi dan Informatika Buton Selatan	Staf Aplikasi dan TIK	Narasumber
4.	PROF. DR. Achmad Nurmandi, M.SC	PT. Sinergi Visi Utama	Direktur Utama	Pembahas
5.	Arrohman Mardiansyah, S.IP., MM	PT. Sinergi Visi Utama	Tenaga Ahli Manajemen	Pembahas
6.	Emilya Uly Artha, S.Kom, M.Kom	PT. Sinergi Visi Utama	Tenaga Ali Teknologi Informasi	Pembahas
7.	Danang Kurniawan, S.I.P., M.I.P	PT. Sinergi Visi Utama	Tenaga Ahli Tatakelola Pemerintahan	Moderator & Pembahas
8.	Antiltha Bayu Nugraha	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Mahasiswa Magang	Peserta Peneliti

9.	Adinda Salsabilla Firdaus	Universitas Muhammadiyah Malang	Mahasiswi Magang	Peserta Peneliti
----	------------------------------	---------------------------------------	---------------------	---------------------

Sumber: Olahdata Peneliti Tahun 2024

2. Data Sekunder

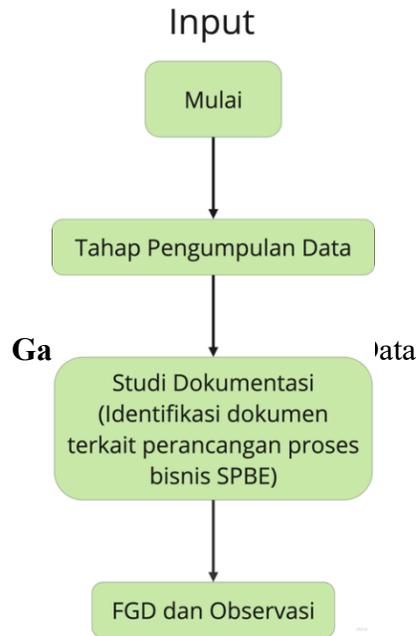
Penelitian ini juga didukung oleh data sekunder sebagai sumber data yang tidak langsung diterima oleh peneliti, yang berfungsi sebagai pelengkap data yang diperlukan peneliti selain data primer. Data sekunder ini juga bertujuan untuk memperluas kajian Model Arsitektur SPBE yang ditempuh peneliti. Data sekunder yang menunjang penelitian ini meliputi:

1. Dokumen Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018
2. Dokumen Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE
3. Dokumen Keputusan Menteri PANRB No.13/2024 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2023
4. Dokumen Peraturan Menteri PANRB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
5. Dokumen Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No.108/2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE
6. Dokumen Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
7. Dokumen Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2023 Tentang Arsitektur dan

- Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
8. Surat Edaran Kementerian PANRB No. 18 Tahun 2022
 9. Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor: 22 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Buton Selatan
 10. Dokumen RKPD Kabupaten Buton Selatan 2024
 11. Peraturan Bupati Buton Selatan No. 21 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Buton Selatan
 12. Dokumen Arsitektur SPBE Diskominfo Kabupaten Bogor
 13. Dokumen Arsitektur SPBE Diskominfo Kabupaten Cirebon
 14. Website resmi Kementerian PANRB
 15. Website resmi Pemerintah Kabupaten Buton Selatan

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada awal tahap penelitian, penulis melakukan studi dokumentasi untuk mengidentifikasi dokumen terkait untuk merancang atau memodelkan proses bisnis SPBE di lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Sumber utama dalam pengumpulan data ini adalah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024. Selain itu, dalam penyusunan model arsitektur SPBE domain proses bisnis terhadap urusan substansi Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, peneliti merujuk pada Modul Penyusunan Peta Rencana SPBE yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



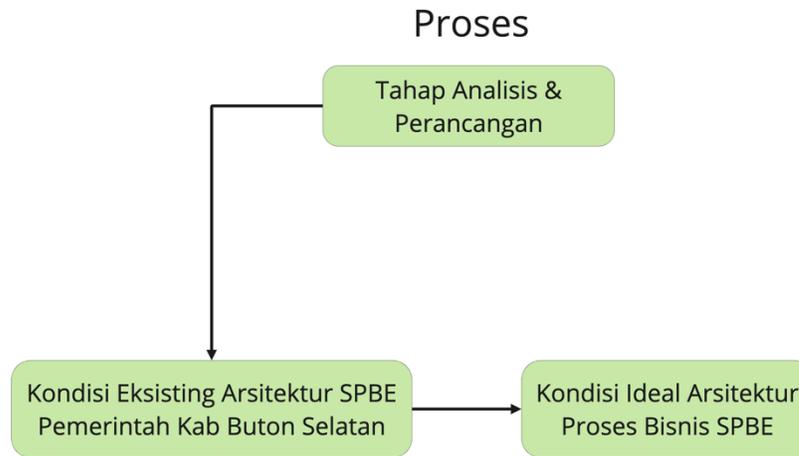
Sumber: Dikelola Oleh Peneliti, 2023

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data hasil dari FGD yang menghasilkan berupa deskripsi kata-kata. Kelebihan teknik pengumpulan data ini adalah bukti empiris dari hasil FGD yang diberikan narasumber, diuraikan pada BAB hasil penelitian dan pembahasan, menunjukkan bahwa jawaban yang diberikan lebih akurat dan mendetail. Selain itu juga, pada tahap ini penulis melakukan pengamatan atau observasi

sebagai tindak lanjut dari seluruh kegiatan FGD yang dilakukan via Zoom

pada

16



November 2023.

1.9.5 Teknik Pengolahan Data

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan terkait pelaksanaan Arsitektur SPBE pada Kabupaten Buton Selatan, penulis mengolah data yang mencakup 3 (tiga) proses diantaranya:

Gambar 1. 3 Proses Pengolahan Data

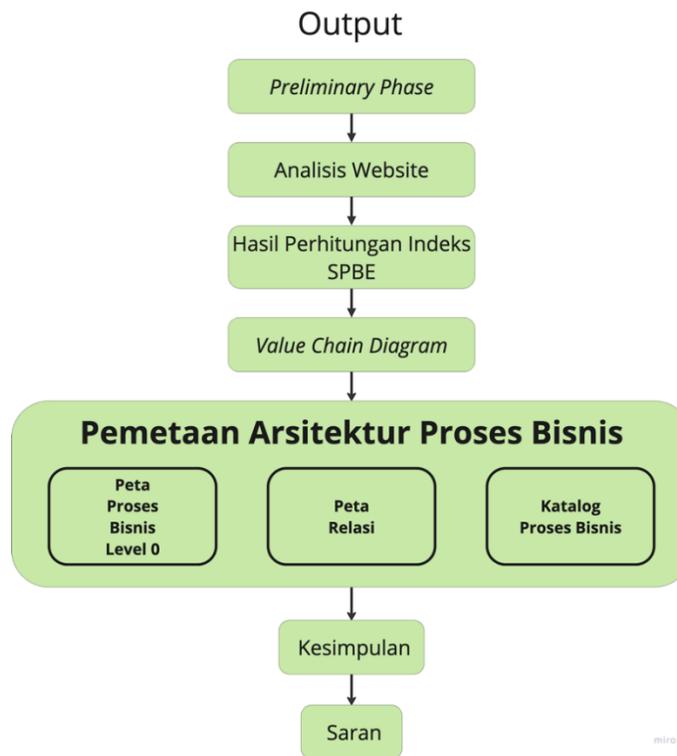
Sumber: Dikelola Oleh Peneliti, 2023

Proses pengolahan data dilakukan setelah melewati klasifikasi awal secara umum, dilanjutkan dengan mereduksi data dari yang telah

diklasifikan sebelumnya. Data diperlukan peneliti selanjutnya dipisahkan yang berikutnya mulai dianalisis serta diklasifikasikan menjadi lebih spesifik. Klasifikasi yang dimaksud meliputi kondisi eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Dengan bekal data terkait kondisi eksisting tersebut, peneliti dapat memproses bagaimana kondisi gambaran pada proses bisnis Pemkab Buton Selatan yang seharusnya.

1.9.6 Teknik Penafsiran Hasil Analisis

Gambar 1. 6 *Output Penelitian*



Sumber: Dikelola Oleh Peneliti, Tahun 2023

Tahap terakhir pada penelitian ini diawali dengan disajikannya tabel Preliminary Phase yang berisikan kondisi eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Selanjutnya penelitian ini juga meneliti terkait website Pemkab Buton Selatan, lalu dilanjutkan dengan penafsiran hasil perhitungan indeks SPBE Buton Selatan Tahun 2023. Penelitian ini juga menampilkan Value Chain Diagram. Pemetaan yang pertama ialah Peta Proses Bisnis level 0 yang

menggambarkan urusan Pemkab setempat berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024. Kedua, peneliti membuat 1 contoh dari Peta Relasi, yang menggambarkan stakeholders atau siapa saja yang terlibat dalam urusan Pemkab Buton Selatan khususnya pada KBS-01. Harapannya, contoh peta relasi yang peneliti buat menjadi gambaran sederhana bagi Pemkab Buton Selatan untuk membuat sekaligus melanjutkan pembuatan peta relasi sesuai dengan urusan dan tupoksi masing-masing stakeholders tersebut. Terakhir ialah Katalog Proses Bisnis, yang menafsirkan integrasi data antar domain Arsitektur SPBE.